

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)* DALAM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DINAS PMPTSP KABUPATEN SUMEDANG

Deva Ilham Syibul Kamal

Universitas Sebelas April

## Article Info

### Article history:

Received Mei 10, 2025

Revised Mei 31, 2025

Accepted Juni 18, 2025

### Keywords:

Public Policy

Implementation of Public Policy

OSS-RBA Policy in Risk-Based Business Licensing

## ABSTRACT

*This study aims to examine the implementation of the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Risk-Based Business Licensing at the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of Sumedang Regency, obstacles to its implementation, and efforts to overcome these obstacles to implementation. The method used in compiling this thesis is a qualitative method with a descriptive type. The sampling technique used was purposive sampling, with research informants: Secretary of the Sumedang Regency DPMPTSP Service, Head of the Sumedang Regency DPMPTSP Licensing Division, Public Complaints Analyst for the Sumedang Regency DPMPTSP Licensing Division, Executive Member of the Sumedang Regency DPMPTSP Licensing Division, Community. Data collection techniques through literature studies and field studies. In analyzing the data used the Miles and Huberman model with the following steps: data reduction, data presentation, conclusion or verification and triangulation. Based on the results of the study, it was concluded that the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Policy in Risk-Based Business Licensing at the Sumedang Regency Investment and One-Stop Integrated Service Agency (DPMPTSP) was implemented quite well. However, in its implementation there are several obstacles experienced, one of which is the minimal participation of the community due to limited access, unwillingness to learn technology and assuming that making permits is complicated, so that the implementation of this policy does not run effectively and optimally in overcoming these obstacles, socialization and education are carried out comprehensively to remote villages to the community. Suggestions related to this study are to increase training programs for the community, especially those who do not understand technology, such as the elderly and business actors in remote areas. To improve understanding of technology, especially for the elderly and business actors in remote areas, it is necessary to hold simple face-to-face or online training with direct assistance from officers*



Copyright © 2025 JRPA. All rights reserved.

## Corresponding Author:

Deva Ilham Syibul Kamal  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sebelas April  
Jl. Angkrek Situ No. 19 - Sumedang  
Email: [ilhamdeva035@gmail.com](mailto:ilhamdeva035@gmail.com)

## 1. INTRODUCTION

Pada era globalisasi ini maraknya perkembangan khususnya di bidang teknologi menjadikan hal yang harus diikuti dalam setiap individu. Hal inilah yang menjadikan setiap individu harus menyesuaikan dengan kemajuan-kemajuan teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Hal ini sangat berpengaruh kepada setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya karena kemudahan kemudahan dalam teknologi akan bisa menyulitkan apabila tidak diimbangi dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi tersebut. Proses tumbuh dan berkembangnya teknologi informasi diterapkan pemerintah dalam bentuk penyelenggaraan pemerintah yang bermaksud dapat diakses oleh masyarakat dalam bentuk pelayanan perizinan yang berkualitas dalam rangka mewujudkan pelayanan perizinan yang terintegrasi secara elektronik.

Perizinan merupakan salah satu pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengawasan yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan merupakan salah satu jenis pelayanan publik dalam bidang administratif. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Terdapat banyak jenis perizinan di Indonesia, sesuai dengan beragamnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya adalah perizinan berusaha. Untuk membuat perizinan berusaha maka pemilik usaha harus menjalani proses birokrasi yang panjang dan berbelit dikarenakan pelayanan yang masih berbasis manual serta banyaknya berkas yang harus disiapkan dan persyaratan harus dipenuhi, pelaku usaha juga harus mengeluarkan biaya selama proses pengajuan perizinan untuk menyiapkan berkas dan juga ongkos transportasi.

Kehadiran Perpres RI Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha bisa membuat pelaku usaha mudah untuk melaksanakan usahanya dalam rangka berkontribusi untuk mengoptimalkan kegiatan ekonomi di negara Indonesia. Di tahun 2020 ada penyederhanaan kembali terkait peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terkait Cipta Kerja yang mana sebuah klaster penyederhanaannya yakni klaster perizinan berusaha. Amanah dalam Pasal 6 UU Cipta Kerja yang mana perizinan berusaha berbasis risiko dilaksanakan sesuai penentuan tingkat risiko serta derajat skala usaha aktivitas usaha. Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing-based approach*) yakni *Online Single Submission* versi 1.1 menjadi berbasis risiko (*risk-based approach/RBA*) yakni *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*. Konsep dari perizinan secara mendasar lewat sistem OSS yakni dalam rangka memfasilitasi kemudahan berusaha melalui penerapan satu portal nasional, satu format izin berusaha serta satu identitas perizinan berusaha.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu perangkat pemerintah yang menerapkan sistem pelayanan satu pintu sebagai instansi dinas yang khusus bertugas memberikan pelayanan Perizinan secara elektronik menggunakan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS -RBA)* dalam pelaksanaannya dan dapat diakses langsung melalui online sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sumedang Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sistem Elektronik Izin Cetak Mandiri yang Terintegrasi dengan *Online Single Submission*, namun tanggung jawab serta peran DPMPTSP Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tetap berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta peraturan yang ada dalam meningkatkan kualitas pelayanannya. Pemerintah Kabupaten Sumedang melakukan perbaikan-perbaikan baik dalam bentuk fisik maupun non fisik, salah satunya ialah perbaikan dalam sektor pelayanan publik khususnya di pelayanan perizinan dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang yang berperan aktif dalam penataan ruang dan mampu mencapai hasil maksimal sesuai tujuan dan sasaran kerja yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui terdapat beberapa gejala yang mengarah terhadap belum optimalnya Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan indikasi belum optimalnya Akses Masuk Website *Online Single Submission (OSS)* Sistem *Online Single Submission (OSS)* ketika digunakan secara Nasional di setiap kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya jumlah pengunjung pada website OSS dalam waktu yang bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk pada website OSS. Masih rendahnya sosialisasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh sehingga belum tersampainya informasi terkait dengan *Online Single Submission (OSS)* kepada masyarakat serta pihak-pihak yang terkait. Dengan kurangnya publikasi terkait dengan sistem aplikasi yang telah dibuat juga menyebabkan masih adanya masyarakat yang belum mengetahui terkait dengan sistem dan alur kerja dari *Online Single Submission (OSS)*. Kurangnya literasi digital terhadap masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang memahami manfaat dari adanya Website *Online Single Submission (OSS)*. Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan (*OSS-RBA*) Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di DPMPTSP Kabupaten Sumedang.

## 2. METHOD

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah Sugiyono (2017: 9). Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (penggabungan), data yang dihasilkan bersifat deskriptif, dan analisis data dilakukan secara induktif, hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Melalui pendekatan deskriptif maka peneliti akan memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang telah diperoleh oleh peneliti melalui wawancara mendalam yang dilakukan dengan para informan (Sulastrri, L, 2017: 13). Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menyajikan gambaran yang lengkap mengenai setting social dan hubungan-hubungan yang terdapat dalam penelitian.

Untuk pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Sedangkan pengolahan dan analisis data yang digunakan melalui data display, reduksi data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi data. Dalam penelitian ini yang menjadi Sasaran adalah Sekretaris Dinas DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Kepala Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Analis Pengaduan Masyarakat Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Anggota Pelaksana Bidang Perizinan DPMPTSP Kabupaten Sumedang, Masyarakat.

## 3. RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* Dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di DPMPTSP Kabupaten Sumedang, maka terdapat pembahasan dari setiap dimensi hasil penelitian sebagai sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang:
  - a. Berdasarkan Dimensi Komunikasi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah cukup baik. Hal tersebut di dukung oleh indikator Sosialisasi dengan melakukan rapat koordinasi antar pegawai, pertemuan-pertemuan dengan lintas bidang. Kemudian Sosialisasi eksternal dilakukan dengan cara penyampaian secara online melalui instagram dan platform lainnya, melakukan pendampingan secara langsung ke wilayah yang sudah ditentukan. Selain itu, indikator Kejelasan dan Konsistensi dikatakan cukup baik dengan seringnya dilakukan pengarahan kepada perangkat daerah, kewenangan yang sudah jelas, koordinasi melalui rapat, evaluasi dan lain sebagainya. Secara umum ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, konsistensi dan kejelasan (*clarity*).
  - b. Berdasarkan Dimensi Sumber Daya dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam pelaksanaan kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko masih ada beberapa pegawai yang minim pengetahuan tentang kebijakan tersebut namun kemampuan pegawai dalam memberikan pelayanan sudah cukup baik.
  - c. Berdasarkan Dimensi Disposisi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah cukup baik. Hal tersebut di dukung oleh indikator kesadaran pelaksana dengan mendukung dan menjalankan adanya kebijakan ini karena sudah menjadi beban pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Kemudian indikator kemampuan dalam pelaksanaan cukup mampu melaksanakan walaupun sepenuhnya tidak secara optimal tetapi pegawai tetap memaksimalkan tugas yang diberikan atau ditetapkan.
  - d. Berdasarkan Dimensi Struktur Birokrasi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sudah cukup baik, namun belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari Koordinasi yang dilakukan dalam Implementasi kebijakan izin berusaha berbasis risiko yaitu koordinasi dengan dinas terkait sudah cukup baik. Namun dengan BKPM memerlukan waktu untuk merespon permasalahan yang diajukan oleh DPMPTSP.
2. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang.
  - a. Dalam dimensi Isi Kebijakan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator pemahaman tujuan isi kebijakan tingkat pemahaman isi kebijakan dalam hal ini bidang perizinan memiliki tingkat pemahaman yang rendah mengenai implementasi kebijakan perizinan berusaha berbasis risiko sehingga berdampak pada penerapan kebijakan.

- b. Dalam dimensi Informasi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator Komunikasi antar pegawai masih sering terjadi salah persepsi terutama ketika sebuah pembaharuan aturan perizinan baru keluar sehingga berdampak terhadap tidak optimalnya pelaksanaan kebijakan tersebut.
  - c. Dalam Dimensi Dukungan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terdapat hambatan dalam proses pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini dapat dilihat dari indikator stakeholder sudah sangat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut. Namun masih ada proses mempelajari baik dari segi aturan karena sering terjadi pembaharuan aturan sehingga perlu untuk dipelajari.
3. Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang.
    - a. Dalam Dimensi Isi Kebijakan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari DPMPTSP Kabupaten Sumedang dengan melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya melakukan sosialisasi menyeluruh, komunikasi dengan BKPM dan mengajukan peraturan bupati untuk lebih meminimalisir kegagalan pemahaman kebijakan.
    - b. Dimensi Informasi dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari DPMPTSP Kabupaten Sumedang dengan melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya dengan melakukan diskusi dan komunikasi terkait dengan peraturan yang baru terbit, mengadakan rapat dan harus saling mengerti serta memahami diantara pegawai.
    - c. Dimensi Dukungan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko upaya yang dilakukan sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari DPMPTSP Kabupaten Sumedang dengan melakukan berbagai upaya strategis, diantaranya dengan memberikan dukungan, meningkatkan kompetensi dan kemampuan dengan mengadakan pelatihan kepada para pegawai.

#### 4. CONCLUSION

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang menggunakan sumber daya yang dimiliki dengan tujuan memberikan serangkaian proses kemudahan, kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya secara legal.

Pelaksanaan Implementasi Kebijakan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sumedang masih terdapat hambatan yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan penerapan kebijakan OSS, yaitu Belum optimalnya Akses Masuk Website *Online Single Submission* (OSS), Masih rendahnya sosialisasi yang belum tersampaikan secara menyeluruh dan Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari adanya Website *Online Single Submission* (OSS), Komunikasi antar pegawai masih sering terjadi salah persepsi, penyelesaian masalah yang tidak bisa diselesaikan oleh Bidang Perizinan dikarenakan harus menunggu arahan dan keputusan dari pemerintah pusat.

Upaya untuk mengatasi hambatan dan meningkatkan implementasi dengan cara melakukan sosialisasi menyeluruh, komunikasi dengan BKPM, Melakukan komunikasi, koordinasikan dengan stakeholder terkait dan Mengadakan rakorsus untuk bisa mengevaluasi kurangnya dimana dan melakukan diskusi terkait dengan peraturan yang baru terbit, mengadakan rapat dan harus saling mengerti memahami diantara pegawai.

Berdasarkan kesimpulan diatas, beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi, yaitu:

1. Tingkatkan program pelatihan bagi masyarakat, terutama yang kurang memahami teknologi, seperti warga lanjut usia dan pelaku usaha di daerah terpencil. Untuk meningkatkan pemahaman teknologi, terutama bagi warga lanjut usia dan pelaku usaha di daerah terpencil, perlu diadakan pelatihan sederhana secara tatap muka atau online dengan pendampingan langsung dari petugas.
2. Libatkan operator desa kecamatan secara aktif dalam memberikan pendampingan langsung. Dengan adanya pendampingan dan pelatihan, masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi secara bertahap dapat memahami dan menggunakan aplikasi OSS, sehingga turut meningkatkan literasi digital mereka.
3. Tingkatkan sarana dan prasarana di DPMPTSP yang kurang agar pelayanan bisa dilakukan dengan optimal. Seperti, pembaruan dan jaringan lebih cepat, serta penataan ruang yang nyaman untuk pelayanan

---

**REFERENCES**

- Assegaf, Muhammad Iqbal Fitra, Henny Juliani, dan Nabiatus Sa'adah. 2019. "Pelaksanaan *Online Single Submission (OSS)* Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah." *Jurnal Hukum Diponegoro* 8 (2): 1328–42.
- Dawud, Joni, Rodlial Ramdhan Tackbir Abubakar, Deni Fauzi Ramdani. 2020. "Implementasi Kebijakan *Online Single Submission* Pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus Di DPMPTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung)." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara* 12 (2): 83–92.
- Hasibuan. 2019. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta, Bumi Aksara. Moleong, L.J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Kusuma, R. dan Lestari, Y. (2023). Studi Kasus Implementasi OSS-RBA di provinsi Jawa Timur. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 14(3), 200-213.
- Raharjo, M. M. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rahmadana, M. F., dkk. (2020). *Pelayanan Publik*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Rizki, Alivia. *Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Publik di Kawasan Perkotaan Kabupaten Nganjuk*. Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya
- Ruwaina, I. (2019). *Efektivitas Kebijakan Online Single Submission Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah*. Universitas Negeri Semarang.
- Mbura, Prisca. (2021). *Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Timor Tengah Utara*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol 3, No.2 <http://eprints.ipdn.ac.id/cgi/search/simple?q=> (20 November 2024)
- Nurdin, I. (2019). *Kualitas Pelayanan Publik*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Pasolong, H. (2017). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Syahrudin, 2019. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung, Nusa Media
- Warih Utami, Marselina Belrda. 2021. Skripsi: "Pelaksanaan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Dalam Perizinan Investasi di Kabupaten Bantul". Bantul: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.